Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 49650-49656

Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Yogyakarta

Alifah Nur Octavian[1*], Mohammad Firdaus[2]
[1,2] Ilmu Pemerintahan, FHISIP, Universitas Terbuka
[*Email:] 049369113@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: Alifah Nur Octavian, 049369113@ecampus.ut.ac.id

Published: September , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang masih menjadi tantangan di Kota Yogyakarta seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang menyebabkan volume sampah terus bertambah. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan sampah yang baik melalui kebijakan dan penegakan peraturan daerah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, penertiban pelanggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, dukungan fasilitas, serta kerja sama berbagai pihak guna mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Satpol PP, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Penegakan Perda

ABSTRACT

This study examines the role of the Public Order Agency (Satpol PP) in enforcing Yogyakarta City Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Waste Management. Waste management remains a challenging environmental issue in Yogyakarta City, driven by increasing community activity and increasing waste volume. This situation demands effective waste management through effective policies and enforcement of regional regulations. This study aims to determine the role of the Satpol PP in enforcing Yogyakarta City Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Waste Management and to identify obstacles encountered in its implementation. This study employed qualitative methods, collecting data through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the Satpol PP plays a role in monitoring, providing outreach, providing guidance, enforcing regulations on violations, and coordinating with relevant agencies. However, the implementation of these duties still faces various obstacles, such as low public awareness, limited human resources, and limited supporting facilities. Therefore, increased outreach, increased facility support, and collaboration with various parties are needed to effectively enforce the Regional Regulation on Waste Management in Yogyakarta City.

Keywords: *Satpol PP, Regional Regulations, Waste Management, Regional Regulation Enforcement*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman, perkembangan sektor perdagangan dan industri, serta meningkatnya aktivitas masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kodoatie (2012), peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan timbulan sampah, sehingga diperlukan sistem

pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di kemudian hari. Pendapat tersebut sejalan dengan Suyoto (2008) yang menyatakan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat modern menyebabkan karakteristik dan volume sampah menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan secara konvensional.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran air, pencemaran udara, menurunnya kualitas tanah, berkembangnya vektor penyakit, serta berkurangnya kualitas lingkungan hidup dan estetika suatu wilayah. Azwar (2010) menjelaskan bahwa penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat menjadi media berkembangnya berbagai mikroorganisme penyebab penyakit sekaligus mencemari lingkungan sekitar. Sementara itu, Tchobanoglous, Theisen, dan Vigil (1993) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah yang buruk tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas lingkungan, kondisi sosial, serta aktivitas ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Alfihad et al. (2023) menyampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu tanggung jawab penting pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada proses pembuangan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan timbulan sampah melalui pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Damanhuri dan Padmi (2019) menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan sampah telah bergeser dari pendekatan kumpul-angkut-buang menjadi pendekatan pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui prinsip reduce, reuse, recycle (3R). Pendapat tersebut diperkuat oleh Slamet (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Ammas et al. (2023) menyebutkan bahwa permasalahan sampah dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara benar. Mohammad et al. (2026) berpendapat bahwa masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan, tidak melakukan pemilahan sampah, serta membuang sampah pada lokasi yang tidak semestinya. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi kurang optimal. Menurut Notoatmodjo (2014), perilaku masyarakat terhadap lingkungan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, serta kesadaran individu sehingga peningkatan edukasi menjadi faktor penting dalam membangun kepatuhan masyarakat. Selain itu, Soekanto (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, efektivitas penegakan hukum, serta keberadaan sanksi yang mampu memberikan efek jera. Mahardayani dan Dhania (2021) juga menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang sulit diatasi apabila tidak diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas.

Di Kota Yogyakarta, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi, perkembangan sektor pariwisata, serta tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, gangguan kesehatan masyarakat, maupun penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Hakim (2023), untuk mengatur pengelolaan sampah tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, kewajiban masyarakat, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ridwan HR (2018) menjelaskan bahwa keberadaan peraturan daerah merupakan

instrumen hukum yang memiliki fungsi penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun demikian, pada praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Keberhasilan suatu kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang disusun, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan mengalami berbagai hambatan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, kemampuan lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tidak hanya bergantung pada substansi aturan, tetapi juga pada efektivitas aparat pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Junaedi (2022), dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas penegakan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Rasyib dan Albab (2023) menyatakan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012, memberikan pembinaan kepada masyarakat, melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi, serta menerapkan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Siagian (2014), efektivitas organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan, koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Atmosudirdjo (1994) menjelaskan bahwa aparat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, masih ditemukannya berbagai pelanggaran dalam pengelolaan sampah meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan peraturan daerah, faktor-faktor yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan penelitian metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Zaman (2025), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Pendapat tersebut sejalan dengan Sugiyono (2023) yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Selain itu, Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan melalui pengumpulan data secara mendalam. Adapun penyajian data dalam

penelitian ini tidak melalui angka-angka, tetapi disampaikan dalam bentuk deskripsi dan narasi mengenai objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2023), ketiga teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang saling melengkapi dalam penelitian kualitatif sehingga mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif. Wawancara dilakukan kepada anggota Satpol PP dan masyarakat yang pernah berinteraksi secara langsung dengan anggota Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah, pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, serta masyarakat yang pernah berinteraksi dengan pelaksanaan penegakan peraturan tersebut. Selama proses wawancara, peneliti melakukan pencatatan terhadap informasi yang diperoleh serta menggunakan alat perekam suara dengan persetujuan informan untuk mempermudah proses dokumentasi data.

Hasil wawancara selanjutnya ditranskripsikan, dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan teori implementasi kebijakan yang digunakan sebagai landasan analisis. Analisis data menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Menurut George C. Edward III (1980) implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh empat faktor utama. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu aturan dan tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pelaksana dan diterima oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. teori implementasi George C. Edward III digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Analisis difokuskan pada bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan kepada masyarakat dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Satpol PP komitmen aparat dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah serta mekanisme koordinasi dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut dibentuk sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan ketertiban dalam pengelolaan sampah. Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penegak peraturan daerah tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator dan pembina masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penelit diketahui bahwa Satpol PP melaksanakan tugas penegakan perda melalui kegiatan patroli lapangan serta penertiban terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang ditemukan di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP diketahui bahwa pelaksanaan penegakan perda pengelolaan sampah lebih mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif. Sebelum memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pasalnya petugas terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan pengelolaan sampah.

"Apabila ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak mematuhi aturan yang berlaku, kami biasanya memberikan teguran dan sosialisasi terlebih dahulu. Kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebelum memberikan tindakan lebih lanjut." (Wawancara Mei 2026).

Dapat diketahui bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan aturan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan dibentuknya peraturan daerah dan memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri. Penegakan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi tetapi juga pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selain melakukan pembinaan kepada masyarakat Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup pemerintah kelurahan serta berbagai pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

"Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya agar penanganan pelanggaran pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." (Wawancara Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah. Kerja sama yang baik memungkinkan pelaksanaan pengawasan dan penertiban berjalan lebih optimal sehingga tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai dengan lebih baik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Satpol PP secara rutin melaksanakan pengawasan dan patroli di berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

"Kami melakukan patroli dan pengawasan secara berkala pada beberapa titik yang sering ditemukan pelanggaran pembuangan sampah. Apabila ditemukan pelanggaran, kami akan memberikan peringatan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat." (Wawancara Mei 2026).

Pelaksanaan patroli dan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan peraturan daerah. Satpol PP berupaya menciptakan lingkungan yang bersih di masyarakat Kota Yogyakarta. Keberadaan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aridho et al (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh pengawasan dan pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Alfihad et al. (2024) juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di daerah. Temuan penelitian ini menguatkan bahwa peran Satpol PP dalam koordinasi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan komunikasi kebijakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Masih ditemukannya pelanggaran menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh sejauh mana informasi dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Faktor Penghambat Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Menurut George C. Edward III dimana implementasi kebijakan dapat mengalami berbagai hambatan apabila salah satu unsur implementasi tidak berjalan secara optimal. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya dan kurang efektifnya komunikasi rendahnya komitmen pelaksana maupun belum optimalnya struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Identifikasi terhadap berbagai faktor penghambat menjadi penting untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dimana Satpol PP Kota Yogyakarta menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan pengelolaan sampah.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan maupun tidak mematuhi ketentuan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

> *"Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya mematuhi aturan pengelolaan sampah. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi masih ditemukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku."* (Wawancara Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan peraturan daerah. Rendahnya kepatuhan masyarakat menyebabkan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah masih sering ditemukan sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari Satpol PP. Selain faktor kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas penegakan perda. Jumlah personel yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya aktivitas masyarakat yang harus dipantau.

> *"Jumlah personel yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. kami harus mengatur jadwal patroli dan pengawasan secara bergantian agar seluruh wilayah tetap dapat terpantau."* (Wawancara 2026).

Keterbatasan personel tersebut dapat mempengaruhi intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga tidak semua lokasi dapat diawasi secara maksimal. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan dan patroli, Satpol PP memerlukan kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai.

> *"Dalam beberapa kegiatan pengawasan, kami masih menghadapi keterbatasan sarana operasional sehingga pelaksanaan patroli belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal."* (Wawancara Mei 2026).

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam kegiatan pengawasan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Dukungan fasilitas yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan perda. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohamad et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat dan belum optimalnya penegakan aturan. Penelitian Alfihad et al. (2024) juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pemerintah daerah dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa hambatan dalam penegakan peraturan daerah tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan utama yang dihadapi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hambatan-hambatan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaan penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta telah menjalankan perannya dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan serta penertiban maupun koordinasi dengan instansi terkait. Ditinjau dari teori implementasi George C. Edward III pelaksanaan penegakan peraturan daerah telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah.

Adapun faktor yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya yang dimiliki Satpol PP serta belum optimalnya koordinasi dalam mendukung pelaksanaan penegakan peraturan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan sosialisasi serta kerja sama antarinstansi agar implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan lebih efektif.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah gar Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan dukungan terhadap Satpol PP melalui penambahan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat meningkat. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, Satpol PP, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Alfihad, M. Y., Zetra, A., & Hendrik, D. (2024). Kapabilitas pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan Padang City Government's capabilities in waste management. *Jurnal Suara Politik, 3*(2), 36–47.

Ammas, S., Hasran, H., Hasran, B., & Fitriani, A. (2023). Patologi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tingkat kecamatan di Takalar. *Journal of Government Insight, 3*(1), 295–304. https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.628

Aridho, A., Ramadhan, T., Sosial, F. I., Medan, U. N., & Daerah, P. (2024). Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Perda Nomor 4 Tahun 2021. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 6*, 28–38.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Hakim, L. (2023). *Pengantar ilmu administrasi pemerintahan*. Malang: UB Press.

Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong, 4*(September), 102–112. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589

Mahardayani, I. H., & Dhania, D. R. (2021). Penegakan Perda di Kabupaten Kudus: Budaya humanis Satpol PP dan pedagang kaki lima (PKL). *Jurnal Psikologi Kreatif Inovatif, 1*(1), 40–45.

Mohamad, I. F., Imran, S. Y., & Arief, S. A. (2026). Kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah. *Civic Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 2738–2751.

Nurhayati, R. (2024). *Strategi manajemen pelayanan publik: Prinsip, asas, dan dinamika prosedurnya*. Jakarta: PT Green Pustaka Indonesia.

Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen pelayanan publik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Rasjid, F. E., & Albab, U. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Gresik. *Journal of Social Contemplativa, 1*(2), 113–128.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zacharias, T. (2025). *Pelayanan publik dan reinventing government era Society 5.0*. Bandung: CV Green Publisher Indonesia.

Zaman, W. K. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Revormasi Jangkar Philosophia.